

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin) di Desa Kletek sangat bergantung pada sejumlah aspek seperti efektivitas komunikasi, ketersediaan dan kualitas sumber daya, sikap dan disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mengatur jalannya program tersebut. Dari sisi komunikasi, meskipun sudah ada upaya penyampaian informasi kepada masyarakat, masih sering ditemukan berbagai kendala yang cukup signifikan. Perubahan jadwal distribusi yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan memadai menyebabkan kebingungan di kalangan penerima manfaat. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak merata juga menjadi persoalan serius, di mana sebagian warga menerima informasi secara lengkap, namun tidak sedikit yang tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Hal ini diperparah dengan kurangnya jalur pengaduan yang jelas dan responsif sehingga ketika masyarakat mengalami masalah atau ketidakpuasan, mereka kesulitan untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan secara efektif. Akibatnya, ketidakpastian dan rasa tidak puas pun meningkat, yang dampaknya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan program.

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama yang juga turut menghambat efektivitas distribusi Raskin di Desa Kletek. Kondisi sumber daya manusia yang ideal sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, namun saat ini jumlah petugas yang berkompeten dan berpengalaman sangat terbatas. Beberapa petugas bahkan belum memahami secara lengkap prosedur distribusi yang benar, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengiriman

bantuan. Tidak kalah penting adalah masalah sumber daya finansial yang kadang terlambat cair, sehingga mengganggu kelancaran pengadaan, termasuk pengiriman dan penyimpanan beras. Fasilitas fisik yang digunakan, seperti gudang penyimpanan beras, juga masih kurang memadai; gudang yang ada sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan kebersihan, sehingga rentan terhadap kerusakan atau kehilangan stok. Selain itu, sarana transportasi yang digunakan untuk distribusi ke masyarakat juga belum optimal, dengan kondisi kendaraan yang kurang prima dan rute yang belum dirancang secara efisien, menimbulkan keterlambatan yang merugikan penerima manfaat.

Dari sisi disposisi pelaksana, sikap petugas yang bertugas dalam menjalankan distribusi program ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Di Desa Kletek, terdapat sejumlah petugas dengan sikap positif, penuh empati, dan komitmen tinggi terhadap tugas mereka, yang membantu memperlancar proses distribusi dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun demikian, mekanisme pengangkatan petugas saat ini kurang selektif dan belum dilengkapi dengan sistem insentif yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan demotivasi dan menurunkan profesionalisme jika petugas merasa tugas mereka tidak dihargai secara proporsional. Perlu adanya perbaikan sistem seleksi yang lebih ketat, disertai pemberian insentif atau penghargaan yang adil, guna mendorong motivasi kerja sekaligus menjaga integritas pelaksana.

Aspek birokrasi juga menjadi salah satu tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Kletek. Struktur birokrasi yang ada saat ini dinilai terlalu kompleks dengan pembagian wewenang yang kurang jelas antar unit terkait, menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan dan penanganan

keluhan masyarakat. Banyak tahapan administrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu lama, sehingga memperlambat percepatan distribusi bantuan serta menghambat respons terhadap permasalahan di lapangan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya penyederhanaan prosedur birokrasi sekaligus peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan terbuka antara berbagai unit pelaksana, agar proses pelaksanaan menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Raskin merupakan kunci utama agar pelaksanaan berjalan dengan konsistensi dan rasa keadilan yang tinggi. SOP yang jelas dan terstandarisasi dapat menjadi panduan yang mengatur seluruh tahapan distribusi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan beras, distribusi, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa SOP yang sudah ada masih memerlukan pengawasan ketat dan pembaruan berkala agar tetap relevan dan mampu menjawab dinamika serta tantangan yang terjadi di lapangan. Pengembangan SOP juga harus melibatkan berbagai pihak untuk mendapat masukan yang komprehensif sehingga standar yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan mudah dipahami oleh semua pelaksana.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas program Raskin di Desa Kletek :

1) Perbaikan Komunikasi

Tingkatkan sistem transmisi informasi yang terstruktur, transparan, dan merata dengan memanfaatkan berbagai media sosialisasi seperti media sosial, radio komunitas, leaflet, serta pertemuan langsung di tingkat desa atau RT/RW. Pastikan adanya jalur pengaduan yang jelas, responsif, dan mudah diakses oleh

masyarakat, baik melalui layanan telepon, aplikasi digital, maupun posko pengaduan fisik.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terkini, dan dapat mempercayai proses distribusi bantuan beras, mengurangi potensi kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi.

2) Optimalisasi Sumber Daya

Perkuat kapasitas petugas distribusi dengan menambah jumlah personel sesuai kebutuhan di lapangan, serta memberikan pelatihan intensif yang mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan pelayanan publik. Pastikan pencairan dana berjalan tepat waktu dan transparan agar tidak menghambat proses distribusi.

Selain itu, fasilitasi penyimpanan beras dengan tempat yang memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta temperatur yang sesuai untuk menjaga kualitas. Transportasi beras juga harus dioptimalkan dengan armada yang memadai dan rute efektif agar penyaluran sampai ke penerima tepat waktu dan dalam kondisi baik.

3) Penguatan Disposisi Pelaksana

Terapkan proses seleksi petugas distribusi secara transparan dan berbasis kompetensi dengan melibatkan masyarakat atau lembaga independen sebagai pengawas agar menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan terpercaya.

Implementasi sistem insentif yang adil, objektif, dan konsisten penting untuk menjaga motivasi, disiplin, dan profesionalisme pelaksana di lapangan. Insentif dapat berupa bonus kinerja, penghargaan, atau apresiasi yang bervariasi sesuai hasil kerja dan tingkat tanggung jawab, sehingga meningkatkan komitmen dan integritas pelaksana.

4) Reformasi Struktur Birokrasi

Lakukan penyederhanaan dan klarifikasi struktur organisasi agar alur pengambilan keputusan dan pelaksanaan distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Penataan kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar unit kerja. Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit dengan mengadakan forum rutin, rapat evaluasi, dan mekanisme kolaborasi efektif yang mengintegrasikan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Penggunaan teknologi informasi dapat mendukung transparansi dan sinkronisasi data antar unit sehingga proses distribusi dan pelaporan dapat dipantau secara real-time.

5) Pengawasan dan Pembaruan SOP

Kembangkan Standard Operating Procedure (SOP) secara komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pelaksana di berbagai tingkatan. SOP harus adaptif terhadap dinamika lapangan dan didasarkan pada prinsip keadilan serta akuntabilitas. Lakukan evaluasi rutin terhadap SOP untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan atau ketidakefisienan prosedur.

Pengawasan ketat perlu diterapkan baik secara internal melalui tim monitoring serta eksternal oleh lembaga pengawas independen agar program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan potensi penyimpangan dapat diminimalisir.